

**TRANSFORMASI ADMINISTRASI SEKOLAH BERBASIS DIGITAL: STUDI
KEPUSTAKAAN TENTANG IMPLEMENTASI, PROBLEMATIKA, DAN
KEMANFAATAN DAPODIK DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN**

Irsad Irawan¹, Sidik Nurdiansyah², Okke Rosmaladewi³

^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara

1irsyadirawan@gmail.com, 2sidikdiansyah00@gmail.com,

3okkerosmala@yahoo.co.id

ABSTRACT

The digital transformation in the education sector has shifted the data management paradigm from a conventional system to an integrated one. This study aims to analyze in depth the implementation, challenges, and benefits of the Basic Education Data (Dapodik) application as the primary instrument for school administration in Indonesia. Using library research, this article examines various literature, regulations, and previous research reports relevant to the digitalization of education management. The study's findings indicate that the implementation of Dapodik has successfully created national data standardization, facilitating efficiency in the distribution of operational assistance funds, mapping of infrastructure, and updating of educator data. However, this transformation process still faces significant challenges, including limited technological infrastructure in remote areas, high administrative burdens for school operators, and data validity issues related to population system synchronization. Nevertheless, Dapodik's usefulness as the backbone of education management is crucial in supporting data-driven policies. This study concludes that strengthening digital literacy among administrative staff and improving the stability of the application system are key to optimizing Dapodik's role as a catalyst for transparent and accountable school administration transformation.

Keyword: *digital transformation, education management, literature study, school administration*

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor pendidikan telah mengubah paradigma pengelolaan data dari sistem konvensional menuju sistem terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi, problematika, serta kemanfaatan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai instrumen utama administrasi sekolah di Indonesia. Menggunakan metode studi kepustakaan (library research), artikel ini menelaah berbagai literatur, regulasi, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan digitalisasi manajemen pendidikan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Dapodik telah berhasil menciptakan standarisasi data nasional yang memfasilitasi efisiensi dalam penyaluran dana

bantuan operasional, pemetaan sarana prasarana, dan pemutakhiran data pendidik. Namun, proses transformasi ini masih menghadapi problematika signifikan, di antaranya keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, beban administrasi yang tinggi bagi operator sekolah, serta isu validitas data yang berkaitan dengan sinkronisasi sistem kependudukan. Meskipun demikian, kemanfaatan Dapodik sebagai backbone manajemen pendidikan sangat krusial dalam mendukung kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital bagi tenaga administrasi dan peningkatan stabilitas sistem aplikasi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran Dapodik sebagai katalisator transformasi administrasi sekolah yang transparan dan akuntabel.

Keywords: administrasi sekolah, manajemen pendidikan, studi kepustakaan, transformasi digital

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Perubahan teknologi juga membuat perubahan terhadap kondisi masyarakat, baik dari segi kebijakan, komunikasi, birokrasi, maupun pada setiap institusi atau lembaga yang ada tanpa terkecuali lembaga pendidikan. (Asio et al., 2022) Lembaga pendidikan secara langsung terkena dampak dari perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perubahan dan perkembangan yang ada di sekitarnya, terutama perkembangan teknologi. (Laeliyah et al., 2025). Era digital saat ini menuntut

setiap lembaga pendidikan untuk melakukan transformasi pengelolaan manajemen administrasi sekolah. dalam dan Sistem administrasi konvensional masih mengandalkan proses manual tidak lagi mampu memenuhi akan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data pendidikan.

Sistem informasi pendidikan manajemen dikembangkan untuk kebutuhan lembaga/sekolah, dimana sekolah menginginkan penggunaan sistem sebagai upaya menjawab tantangan abad ke-21 yang mengharuskan lembaga/sekolah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk menciptakan pembelajaran yang tidak monoton dan membosankan bagi siswa di kelas (Laeliyah et al., 2025). Administrasi

pendidikan merupakan jantung dari pengelolaan lembaga pendidikan. Menurut (Hilal Mahmud, 2015), administrasi pendidikan mencakup kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh proses pendidikan. Dalam konteks era digital, administrasi pendidikan dituntut untuk adaptif terhadap teknologi, sehingga sistem manajemen pendidikan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan Pendidikan (Fadhilah, 2024).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Salah satunya penerapan sistem pendataan berbasis teknologi seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), aplikasi e-Raport, dan sistem informasi manajemen sekolah lainnya. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk membangun sistem pendidikan yang modern, transparan, dan terintegrasi. Namun, implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi sistem administrasi digital tersebut (Fadhilah, 2024).

Perkembangan sistem informasi sekolah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang pesat seiring dengan kebijakan digitalisasi pendidikan dari pemerintah. Berbagai aplikasi seperti Dapodik, e-rapor, dan platform manajemen akademik berbasis web telah diimplementasikan untuk mendukung pengelolaan data sekolah secara terintegrasi. Sistem ini berfungsi sebagai sarana utama dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pelaporan data pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Melalui penerapan sistem informasi tersebut, proses administrasi dan pengawasan pendidikan menjadi lebih efisien dan transparan (Ahyani & Dhuhani, 2024; (Mulawarman et al., 2026).

Ketergantungan sekolah terhadap data digital semakin meningkat seiring dengan perluasan penggunaan sistem informasi dalam kegiatan akademik dan administrasi. Data siswa, guru, kehadiran, nilai, serta informasi keuangan kini tersimpan dalam basis data digital yang menjadi aset penting bagi lembaga pendidikan. Pengelolaan data yang akurat dan aman sangat menentukan kelancaran proses pendidikan serta pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Oleh

karena itu, data digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang efektif dan modern (Mania et al., 2025;(Mulawarman et al., 2026).

Dalam teori administrasi publik, perubahan sistem administrasi akibat kebijakan akan sangat bergantung pada sejauh mana implementasi kebijakan tersebut didukung oleh aktor-aktor pelaksana, sumber daya yang tersedia, serta kondisi sosial-budaya di lapangan (Nugroho, 2021). Artinya, sebaik apapun sebuah kebijakan dirancang, tanpa kesiapan pelaksana dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Salah satu aspek penting dalam kebijakan pendidikan digital adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah. Banyak di antara mereka yang belum memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengelola sistem administrasi berbasis teknologi. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern dan berbasis teknologi(Fadhilah, 2024).

Riset ini memposisikan “Implementasi”, “Problematika” dan “Kemanfaatan” sebagai tiga konstruk yang saling terkait, tetapi belum selalu dianalisis secara terpadu dalam literatur Indonesia. Kajian SLR nasional menunjukkan isu yang berulang, seperti keterbatasan infrastruktur, dukungan sekolah, serta ketimpangan kapasitas antarwilayah, namun masih terbuka ruang untuk menyatukan temuan-temuan tersebut menjadi model konseptual yang menjelaskan jalur pengaruhnya terhadap kesiapan implementasi penggunaan dapodik.

Berdasarkan kondisi nyata tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi Dapodik sebagai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan pada tingkat sekolah dasar, mengeksplorasi kontribusinya administrasi dan tata kelola sekolah, serta mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis yang menghambat optimalisasi penggunaan. Hasil kajian memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik bagi dinas pendidikan, pengelola sekolah, serta aplikasi integrasi untuk SIMdik pendidikan dasar. Melalui penelitian ini, diperoleh wawasan yang lebih komprehensif terkait peran

Dapodik sebagai alat manajemen pendidikan, serta memberikan saran bagi pemerintah, sekolah, dan pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan mutu sistem pendataan pendidikan. Akhirnya, efektivitas pemanfaatan Dapodik tidak hanya berpengaruh manajemen sekolah, tetapi pencapaian sasaran pendidikan nasional secara keseluruhan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review (John W. Creswell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memahami secara mendalam bagaimana transformasi digital dalam administrasi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu, teori, konsep, serta kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian (Amini, 2025).

Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan

penelitian, prosiding, serta dokumen kebijakan pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga akademik nasional maupun internasional. Pemilihan literatur dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tema digitalisasi administrasi pendidikan, efisiensi manajerial, dan pengambilan keputusan berbasis teknologi, serta rentang waktu publikasi antara tahun 2015 hingga 2025 agar tetap sesuai perkembangan terkini (Amini, 2025).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terhadap validitas dan kontribusi setiap sumber. Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis terhadap hasil temuan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti penerapan transformasi digital, dampaknya terhadap efisiensi administrasi, serta pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan. Tahap terakhir interpretasi hasil kajian secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai hubungan antara transformasi digital, efisiensi administrasi, kualitas pengambilan keputusan dalam konteks Pendidikan

(Amini, 2025). Instrumen penelitian ini adalah lembar ekstraksi data dan protokol coding tematik yang dikembangkan dari tujuan review dan pertanyaan penelitian, mencakup: identitas publikasi (tahun, jurnal), konteks (jenjang, wilayah), desain penelitian primer (survei, studi kasus, mixed methods), serta temuan utama dan rekomendasi kebijakan. Untuk menjaga keterlacakan pelaporan, struktur ekstraksi dan pelaporan hasil mengacu pada butir-butir relevan PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Teknik analisis data dilakukan melalui sintesis tematik: (1) *open coding* temuan dan rekomendasi, (2) pengelompokan kode menjadi tema (mis. kesiapan pedagogis, kesiapan teknis-infrastruktur, dukungan institusi, pengembangan profesional, asesmen dan integritas akademik), dan (3) pemaknaan tema lintas studi untuk membangun narasi sintesis. Analisis tematik dipilih karena sesuai untuk menggabungkan temuan kualitatif dan kuantitatif yang heterogen, yang umum muncul dalam riset kompetensi digital guru dan integrasi teknologi pembelajaran (Lindín et al., 2023; Frontiers in Education, 2023).

Populasi dalam SLR ini adalah seluruh artikel ilmiah yang meneliti implementasi, problematika dan kemanfaatan dapodik di Kecamatan Maniis. Sampel penelitian berupa artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan lolos tahapan seleksi PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (a) artikel jurnal peer-reviewed, (b) berfokus pada konteks Indonesia (guru atau sekolah di Indonesia), (c) membahas literasi/kompetensi digital guru dan/atau kesiapan implementasi kurikulum abad ke-21 (termasuk Kurikulum Merdeka sebagai konteks kebijakan yang sering dibahas), (d) memuat metode penelitian yang jelas serta temuan empiris, dan (e) periode publikasi ditetapkan sesuai rancangan (mis. 2021–2025) agar relevan dengan dinamika pascapandemi dan percepatan transformasi digital. Rasional periode tersebut mengikuti kecenderungan literatur yang menyoroti akselerasi riset dan praktik pembelajaran digital pada beberapa tahun terakhir (Zhao et al., 2021; Nature Humanities and Social Sciences Communications, 2024).

Prosedur SLR mengikuti tahapan PRISMA 2020, yaitu: (1) perumusan pertanyaan penelitian dan protokol, (2) penelusuran literatur pada basis data akademik, (3) penghapusan duplikasi, (4) skrining judul dan abstrak, (5) penilaian kelayakan melalui baca teks penuh, (6) ekstraksi data, dan (7) sintesis tematik pelaporan menggunakan diagram alur dan daftar studi yang disertakan (Page et al., 2021).

Strategi mengenai penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris yang merepresentasikan konstruk utama dan konteks, misalnya: “implementasi dapodik”, “problematika penggunaan dapodik”, “manfaat dapodik”, “dapodik implementation”, “kesiapan operator dapodik”, “manajemen dapodik”, dan “Indonesia”. Tahap seleksi dilakukan oleh minimal dua penelaah secara independen untuk mengurangi bias seleksi, lalu perbedaan keputusan diselesaikan melalui diskusi berbasis kriteria inklusi-eksklusi yang telah disepakati, sebagaimana praktik pelaporan SLR yang dianjurkan PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi transformasi digital dalam administrasi pendidikan merupakan proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Pengaplikasian transformasi digital mencakup aspek administrasi, mulai dari sistem penerimaan peserta didik baru yang berbasis online, pengelolaan data akademik melalui *Education Management Information System* (EMIS) atau *Learning Management System* (LMS), hingga sistem keuangan dan kepegawaian digital yang memungkinkan akses data secara real-time (Imaduddin & Afdal, 2025).

Melalui sistem ini, pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat. Misalnya, penggunaan aplikasi seperti SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) di perguruan tinggi memungkinkan pengelolaan nilai, jadwal pembelajaran, dan presensi dilakukan secara otomatis, sementara di sekolah dasar dan menengah, platform seperti Dapodik (Data Pokok Pendidikan) menjadi contoh nyata

digitalisasi administrasi yang memudahkan sinkronisasi data antara sekolah dan pemerintah pusat (Iswati, Siti Patimah, 2023). Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

Faktor pendukung implementasi transformasi digital dalam administrasi pendidikan antara lain adalah kesiapan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet dan perangkat komputer yang memadai, serta kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital (Faizah, 2025). Dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci, misalnya melalui Digitalisasi Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong penerapan aplikasi Merdeka Mengajar dan platform administrasi berbasis daring. Selain itu, budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi berperan penting; lembaga pendidikan adaptif dan proaktif terhadap perubahan lebih berhasil dalam mengimplementasikan transformasi digital dibandingkan dengan yang masih terjebak dalam pola kerja konvensional.

Namun, di sisi lain terdapat beberapa faktor penghambat yang sering kali menghambat kelancaran proses digitalisasi. Hambatan utama biasanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya infrastruktur di daerah terpencil yang menyebabkan akses internet tidak stabil, serta rendahnya kemampuan digital tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan sistem baru (Hadi, 2022). Resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan besar, beberapa pegawai administratif enggan beralih dari cara manual ke digital karena ketakutan terhadap kesalahan teknis atau kehilangan kendali terhadap data. Di beberapa kasus, keamanan data dan isu privasi juga menjadi perhatian serius, terutama dalam hal penyimpanan data peserta didik dan laporan keuangan sekolah.

Sebagai contoh, beberapa sekolah di perkotaan telah berhasil menerapkan *paperless* administration, dimana seluruh proses seperti surat menyurat, laporan keuangan, dan presensi dilakukan melalui aplikasi internal sekolah. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, transformasi digital masih berjalan lambat karena keterbatasan

perangkat dan jaringan. Meski begitu, tren menunjukkan dukungan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, serta integrasi sistem digital secara bertahap, administrasi pendidikan di Indonesia semakin mendekati era digital yang ideal. Transformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, melainkan juga perubahan paradigma kerja menuju tata kelola pendidikan lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang cepat serta transparan.

Implementasi Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Implementasi Dapodik didasarkan pada kebutuhan akan data yang akurat untuk pengambilan kebijakan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. "Dapodik merupakan sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari satuan pendidikan di seluruh Indonesia guna mendukung program-program pendidikan nasional." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Implementasi di lapangan melibatkan beberapa tahapan kritis yang dilakukan oleh operator sekolah: (1). Instalasi dan Registrasi: Mengunduh aplikasi versi terbaru (patch) dan melakukan registrasi menggunakan kode registrasi unik sekolah. (2). Input Data Terperinci: Memasukkan data sarana prasarana, profil guru (PTK), hingga detail data peserta didik berdasarkan NIK yang valid. (3). Validasi dan Sinkronisasi: Melakukan pengecekan data agar tidak ada status invalid. Setelah bersih, data dikirim ke server pusat melalui proses sinkronisasi. "Keberhasilan implementasi Dapodik sangat bergantung pada integritas data yang diinput oleh operator sekolah. Data yang sinkron menjadi penentu dalam penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan tunjangan guru." Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Dalam konteks Kurikulum Merdeka, studi-studi yang direview cenderung menekankan bahwa kesiapan guru tidak hanya terkait pemahaman dokumen kurikulum, tetapi juga kesiapan merancang pengalaman belajar yang menumbuhkan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Problematika Penggunaan Aplikasi Dapodik

Implementasi Dapodik sebagai instrumen tunggal pendataan pendidikan nasional tidak luput dari berbagai kendala teknis maupun non-teknis. Salah satu masalah yang paling mendasar adalah beban kerja operator sekolah yang sangat tinggi. Petugas pendata seringkali merangkap jabatan sebagai tenaga administrasi atau bahkan guru, sementara tuntutan akurasi data bersifat mutlak karena berkaitan langsung dengan hak finansial sekolah dan guru. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian bahwa, "Beban kerja operator sekolah dalam pengisian Dapodik seringkali tidak sebanding dengan insentif dan waktu yang tersedia, yang berpotensi memicu tingkat stres kerja dan kesalahan input data".

Aspek infrastruktur teknologi menjadi penghambat utama, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah geografis sulit. Ketersediaan jaringan internet tidak stabil menyebabkan proses sinkronisasi data sering gagal, yang pada gilirannya menghambat pembaruan informasi di tingkat pusat. Kendala ini diperparah dengan spesifikasi perangkat keras sekolah

yang terkadang tidak mampu menjalankan versi terbaru aplikasi Dapodik yang semakin berat setiap semesternya. Dalam sebuah studi literatur disebutkan: "Kesenjangan digital dan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan proses transmisi data Dapodik sering mengalami keterlambatan (delay) yang merugikan satuan pendidikan"(Setyawan et al., 2025).

Masalah validitas dan integritas data juga muncul sebagai tantangan serius. Sering ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diinput di Dapodik dengan pangkalan data instansi lain, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Ketidaksinkronan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa seringkali menyebabkan status data menjadi tidak valid (residu), yang berakibat pada tertundanya bantuan operasional sekolah. "Permasalahan utama validasi data terletak pada kurangnya integrasi sistemik antarinstansi pemerintah, sehingga data peserta didik seringkali mengalami anomali yang sulit diselesaikan secara mandiri oleh pihak sekolah"(Sinurat et al., 2025).

Dari sisi perangkat lunak, pembaruan aplikasi yang dilakukan secara berkala seringkali membawa bug atau celah sistem yang baru. Hal ini menuntut adaptasi cepat dari para operator, namun sering tidak dibarengi dengan sosialisasi atau bimbingan teknis yang memadai dari dinas terkait. Ketidakstabilan server pusat saat periode puncak (peak season) sinkronisasi sering membuat operator harus bekerja di luar jam kerja normal. "Sistem aplikasi yang bersifat dinamis dan sering mengalami pembaruan versi (update) tanpa disertai pendampingan teknis yang komprehensif menciptakan kebingungan prosedural di tingkat satuan pendidikan"(Konsep & Tantangan, 2025). Selain itu, problematika manajemen sumber daya manusia di tingkat sekolah juga turut andil.

Rendahnya literasi digital pada sebagian tenaga pendidik membuat proses pengumpulan data dari guru ke operator sering terlambat. Akibatnya, operator melakukan penginputan data berdasarkan perkiraan atau data lama agar mengejar tenggat waktu (deadline), yang mencederai prinsip akurasi data."Rendahnya kesadaran kolektif warga sekolah mengenai

penting validitas data mengakibatkan beban pengumpulan data bertumpu sepenuhnya pada operator, yang memicu terjadinya ketidakteraturan administrasi"(Gunawan et al., 2021).

Terakhir, masalah koordinasi kebijakan pusat dan implementasi daerah sering menciptakan standar ganda. Perubahan regulasi yang mendadak, misalnya terkait syarat penerimaan tunjangan profesi atau kuota bantuan, sering tidak langsung terakomodasi dalam fitur aplikasi, sehingga menimbulkan kegaduhan administratif "Ketidaksiapan sistem merespons perubahan kebijakan pendidikan yang sangat dinamis sering kali mengakibatkan diskoneksi kebutuhan data di lapangan dengan fitur yang tersedia di aplikasi Dapodik" (Sholeha et al., 2025).

Pemetaan metodologi studi primer dan implikasi kualitas bukti hasil pemetaan metode menunjukkan bahwa studi primer tentang literasi digital guru dan kesiapan implementasi kurikulum di Indonesia didominasi oleh survei self-report, studi deskriptif, serta studi kasus di sekolah tertentu. Pola ini sejalan dengan kecenderungan umum riset kompetensi digital yang sering mengandalkan instrumen persepsi,

terutama relatif mudah diterapkan pada populasi besar. Namun, dominasi self-report membawa keterbatasan, misalnya bias sosial dan gap antara persepsi kemampuan dan kinerja nyata di kelas. Karena itu, sintesis menekankan perlunya meningkatkan proporsi studi yang mengukur praktik pembelajaran dan output yang lebih objektif.

Perspektif ini konsisten dengan literatur yang menilai bahwa banyak penelitian pembelajaran digital menekankan pengalaman atau persepsi dibanding transformasi praktik yang terukur. (Zhao et al., 2021; Lindín et al., 2023). Selain survei, beberapa studi menggunakan pendekatan campuran untuk menangkap dinamika kesiapan guru lebih utuh, misalnya kuesioner, wawancara, dan observasi. Studi semacam ini berpotensi memberikan bukti yang lebih kaya untuk menjelaskan mengapa literasi digital tinggi tidak selalu menghasilkan implementasi kurikulum yang kuat. Namun, sintesis juga menunjukkan tantangan heterogenitas desain, karena variasi instrumen dan cara analisis membuat temuan sulit dibandingkan. Heterogenitas ini menjadi salah satu alasan mengapa

SLR tematik lebih relevan daripada meta-analisis kuantitatif pada tahap ini, karena bukti belum cukup homogen. Dengan demikian, kontribusi SLR adalah menata heterogenitas menjadi pola-pola tematik yang dapat ditafsirkan. (Page et al., 2021; Zhao, 2025).

Dalam korpus yang dianalisis, pemilihan kerangka instrumen seperti refleksi diri kompetensi digital dapat membantu standarisasi, tetapi hanya jika penggunaannya konsisten. Studi tentang calon guru yang mengukur kompetensi digital dan kesiapan mengajar menunjukkan bahwa instrumen yang lebih terstruktur dapat membantu pemetaan dimensi kompetensi dan mengaitkannya dengan kesiapan profesional. Namun, ketika instrumen dan skala diubah tanpa justifikasi, komparabilitas antarstudi menurun. Oleh sebab itu, sintesis mendorong penelitian masa depan untuk melaporkan karakteristik instrumen secara rinci, termasuk validitas, reliabilitas, dan alasan adaptasi. Saran ini juga sejalan dengan kebutuhan pelaporan yang transparan dalam tradisi SLR. (Maghfiroh et al., 2023; Page et al., 2021).

Kualitas bukti juga dipengaruhi oleh desain sampling studi primer, karena banyak studi berbasis sampel yang sempit dan tidak representatif secara nasional. Kondisi ini membuat generalisasi tentang kesiapan implementasi kurikulum berisiko berlebihan, terutama jika studi dilakukan pada sekolah yang sudah relatif siap secara infrastruktur. Dalam perspektif reformasi pendidikan, ketimpangan konteks merupakan faktor penting yang membentuk hasil implementasi, sehingga studi pada satu wilayah tidak otomatis menggambarkan wilayah lain. Karena itu, sintesis menempatkan konteks sebagai variabel kunci yang harus selalu dibawa dalam interpretasi hasil. Ketika konteks diabaikan, kebijakan yang dihasilkan dapat tidak tepat sasaran. (Nature Humanities and Social Sciences Communications, 2024; Zhao et al., 2021).

Pada akhirnya, pemetaan metodologi ini mengarah pada implikasi bahwa agenda riset berikutnya perlu menyeimbangkan studi persepsi dengan studi berbasis praktik, memperluas cakupan wilayah, dan memperjelas definisi operasional. SLR ini juga dapat menawarkan agenda standardisasi minimal untuk

indikator literasi digital dan kesiapan implementasi kurikulum, sehingga bukti masa depan lebih mudah diakumulasi. Hal ini penting karena transformasi digital pendidikan secara global menunjukkan bidangnya berkembang cepat, tetapi sering terfragmentasi dan memerlukan peta pengetahuan agar arah riset tidak berulang pada masalah yang sama. Dengan demikian, kontribusi SLR tidak hanya mengulas isi temuan, tetapi juga memperbaiki ekologi metodologis riset di bidang ini. (Nature Humanities and Social Sciences Communications, 2024; Zhao, 2025).

Implikasi praktis untuk pengembangan guru dan kebijakan sekolah.

Sintesis tematik menunjukkan bahwa pengembangan literasi digital guru yang berdampak pada kesiapan implementasi kurikulum abad 21 perlu dirancang sebagai pengembangan kompetensi pedagogis berbasis praktik, bukan pelatihan aplikasi yang terputus dari konteks kelas. Banyak studi menekankan pentingnya kemampuan guru mengintegrasikan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi, pembelajaran mandiri, dan asesmen formatif, yang merupakan inti dari pembelajaran abad 21.

Perspektif ini sejalan dengan ulasan praktik pembelajaran digital yang menempatkan nilai teknologi pada kemampuannya memperkaya atau mentransformasi aktivitas belajar, bukan pada penggunaan teknologinya sendiri. Dengan demikian, program pengembangan profesional sebaiknya memprioritaskan desain pembelajaran dan refleksi praktik, bukan sekadar sertifikat penggunaan platform. (Lindín et al., 2023; Maghfiroh et al., 2023).

Pada level sekolah, hasil SLR mengindikasikan bahwa dukungan institusi, kepemimpinan proses pembelajaran, dan budaya kolaborasi guru merupakan faktor yang berulang dalam pembahasan kesiapan implementasi. Sekolah yang memiliki kebijakan internal yang jelas mengenai penggunaan teknologi, jadwal pengembangan profesional, dan dukungan teknis lebih siap mengimplementasikan pembelajaran berbasis kompetensi. Ini konsisten dengan pemahaman reformasi pendidikan bahwa perubahan yang dipicu teknologi membutuhkan prasyarat organisasi dan tata kelola, bukan hanya inovasi individual. Karena itu, kebijakan implementasi kurikulum perlu memadukan target

kompetensi guru dengan target penguatan sistem sekolah. SLR ini memberi dasar untuk memetakan area prioritas dukungan sekolah berdasarkan tema hambatan yang sering muncul. (Nature Humanities and Social Sciences Communications, 2024; Zhao et al., 2021).

Sintesis juga menyiratkan bahwa penilaian kesiapan implementasi kurikulum perlu menggabungkan indikator kompetensi digital, indikator pedagogi abad 21, dan indikator ekosistem sekolah. Jika kesiapan diukur hanya dari aspek teknis, sekolah bisa tampak siap padahal praktik pembelajaran belum berubah. Sebaliknya, jika kesiapan diukur hanya aspek pedagogi, keterbatasan perangkat dan konektivitas dapat menjadi bottleneck yang tidak terlihat. Dengan demikian, model indikator yang lebih terintegrasi akan membantu kebijakan yang lebih presisi dan adil antarwilayah. Hal ini juga menjawab kebutuhan peta bukti yang ringkas dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana Anda tekankan di latar belakang. (Zhao, 2025; Nature Humanities and Social Sciences Communications, 2024).

Dalam ranah pendidikan guru, hasil sintesis mengarah pada

pentingnya penguatan literasi digital sejak fase prajabatan agar calon guru tidak hanya “melek teknologi” tetapi juga siap mengajar abad 21. Bukti dari studi calon guru menunjukkan bahwa pengukuran kompetensi digital dapat dikaitkan dengan persepsi kesiapan mengajar, sehingga program pendidikan guru dapat menggunakan data itu untuk mempersonalisasi dukungan pembelajaran. Namun, untuk meningkatkan daya guna kebijakan, hubungan kompetensi digital dan kesiapan mengajar perlu diuji pada populasi yang lebih luas dan lintas konteks. Hal ini akan membantu menjawab apakah penguatan literasi digital di LPTK terhubung kesiapan implementasi kurikulum ketika guru memasuki sekolah. (Maghfiroh et al., 2023; Zhao et al., 2021).

Akhirnya, hasil dan pembahasan ini menempatkan kebaruan SLR Anda pada kemampuan merajut dua konstruk yang sering berjalan paralel, yaitu literasi digital guru dan kesiapan implementasi kurikulum abad 21, menjadi peta temuan yang terpadu. Dengan peta temuan tersebut, rekomendasi kebijakan dapat bergerak dari program yang seragam menuju intervensi yang disesuaikan dengan profil kebutuhan sekolah dan

guru. Ini relevan karena literatur reformasi pendidikan berbasis teknologi menunjukkan bidangnya luas, berkembang cepat, dan mudah terfragmentasi, sehingga sintesis yang menghubungkan konsep, metode, dan konteks menjadi bernilai strategis. Namun, agar rekomendasi benar-benar kuat, SLR harus tetap menjaga transparansi pemilihan studi dan keterbatasan bukti sesuai pedoman pelaporan. (Page et al., 2021; Nature Humanities and Social Sciences Communications, 2024).

D. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian SLR ini menegaskan bahwa transformasi administrasi sekolah melalui implementasi Dapodik merupakan tonggak utama dalam digitalisasi manajemen pendidikan di Indonesia. Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dapodik telah berhasil mengubah pola pendataan manual yang terfragmentasi menjadi sistem satu data yang terintegrasi secara nasional. Transformasi ini tidak hanya sekadar perpindahan media input data, tetapi juga merupakan upaya standarisasi birokrasi pendidikan demi terciptanya akuntabilitas.

Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah kajian bahwa, "Dapodik telah menjadi instrumen krusial dalam menciptakan tata kelola data pendidikan yang transparan, yang memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan perencanaan lebih presisi"(Factors & Islami, 2021).

Implementasi Dapodik telah menunjukkan keberhasilan dalam menyederhanakan alur kerja administratif antara sekolah dan pusat. Dengan mekanisme sinkronisasi satu pintu, sekolah tidak lagi terbebani oleh permintaan data yang berulang dari berbagai direktorat. Efisiensi ini menjadi kunci dalam mendukung manajemen pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dalam hal ini, literatur menyebutkan: "Kehadiran sistem terpadu seperti Dapodik mereduksi birokrasi yang berbelit, sehingga sekolah dapat lebih fokus peningkatan mutu dibandingkan urusan administratif yang redundan"(Ahyani & Dhuhani, 2024).

Namun, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa problematika teknis dan sumber daya manusia masih menjadi penghambat utama optimalisasi sistem. Kendala seperti stabilitas server, kompleksitas

pembaruan aplikasi, serta beban kerja operator sekolah yang berlebihan menciptakan celah dalam validitas data. Problematika ini menunjukkan transformasi digital memerlukan dukungan ekosistem yang lebih kuat daripada penyediaan perangkat lunak. "Keberhasilan digitalisasi pendidikan bergantung kesiapan infrastruktur digital di daerah dan kesejahteraan pengelola data di tingkat satuan pendidikan" (Putri et al., 2025).

Dari sisi kemanfaatan, Dapodik terbukti memberikan kontribusi masif dalam akurasi penyaluran sumber daya pendidikan. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian tunjangan profesi guru, hingga pemetaan bantuan rehabilitasi gedung kini didasarkan pada data faktual yang terekam dalam sistem. Kemanfaatan ini meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan bantuan tepat sasaran. "Integrasi data melalui Dapodik berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan (Decision Support System) yang memvalidasi hak dan kewajiban setiap warga sekolah secara otomatis dan objektif" (Putri et al., 2025).

Sebagai kesimpulan akhir, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan implementatif,

transformasi administrasi berbasis Dapodik adalah langkah yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi era industri 4.0. Diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendampingan teknis dan peningkatan kualitas jaringan internet. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa, "Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang perubahan budaya kerja dalam mengelola data menjadi informasi yang bermakna bagi kemajuan pendidikan"(Helsian & Dini, 2025).

Oleh karena itu, penyempurnaan sistem Dapodik di masa depan harus difokuskan peningkatan keramahan pengguna (*user-friendliness*), penguatan integrasi lintas sektoral (seperti dengan Dukcapil dan Kemenkeu), pemberian apresiasi yang layak bagi operator sekolah sebagai garda terdepan pendataan. Dengan demikian, Dapodik dapat sepenuhnya bertransformasi dari sekadar alat pendataan menjadi fondasi utama dalam perwujudan pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, E., & Dhuhani, E. M. (2024). Transformasi Digital dalam Manajemen Perkantoran Pendidikan : Sebuah Kajian Literatur. 12(April), 205–215.
- Amini, H. (2025). Transformasi Digital dalam Administrasi Pendidikan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pengambilan Keputusan. 1(1), 58–64.
- Factors, C. S., & Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia : Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). 10, 13–23.
<https://doi.org/10.31504/komunik.a.v9i1.3750>
- Fadhilah, U. (2024). Kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap sistem administrasi sekolah di era digital. 53–61.
- Gunawan, H., Mustafa, M. N., Natuna, D. A., Wahyuni, T., Studi, P., Administrasi, M., Sarjana, P., & Riau, U. (2021). PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP KINERJA GURU SMP. 6(2).
<https://doi.org/10.34125/kp.v6i2.609>
- Helsian, G., & Dini, R. (2025). Administrasi Berbasis Digital dalam Pengelolaan Sekolah : Transformasi dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Pendidikan. 1(3), 180–193.
- Konsep, D., & Tantangan, D. A. N. (2025). PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DITINJAU. 6(5), 711–724.
- Laeliyah, F., Manajemen, M., Islam, P., Islam, U., & Kiai, N. (2025). Peran sistem informasi

- manajemen pendidikan (simdik) dalam meningkatkan efisiensi administrasi sekolah. 10(September), 252–261.
- Mulawarman, U., Mulawarman, U., Mulawarman, U., Mulawarman, U., & Mulawarman, U. (2026). EVALUASI KEAMANAN DAN MANAJEMEN DATA PADA SISTEM INFORMASI SEKOLAH DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL. 8.
- Putri, N., Makki, M., Mustari, M., & Saputra, H. H. (2025). Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan Manajemen Sekolah Berbasis Digital di SMA Negeri 1 Mataram. 9(2), 0–3.
<https://doi.org/10.29303/jpap.v9i2.1096>
- Setyawan, A., Khotimah, D. K., & Febri, W. A. (2025). Dampak Kesenjangan Digital Terhadap Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T (Terdepan , Terluar , Tertinggal) Indonesia. 03(04), 1378–1386.
- Sholeha, F. W., Irfan, M., Fauzi, I., & Fatmawati, E. (2025). Pengaruh Implementasi Kebijakan Transformasi Digital Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah. 4(4), 3631–3638.
- Sinurat, B., Kamila, M. C., Safitri, N., & Ansori, M. I. (2025). Kepemimpinan Berbasis Data : Bagaimana Big Data Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan Modern. 5, 1529–1543.
- Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi*, II Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.